

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI RIAU

Aulia Putri Cornella¹⁾, Erni Febrina Harahap²⁾, Kasman Karimi³⁾

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, dan Bisnis

Universitas Bung Hatta

Email : auliaputricornella@gmail.com, erni_fh@yahoo.com,
kasmankarimi1967@gmail.com

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan sendiri, sehingga daerah mempunyai kesempatan yang lebih dalam mengatur rumah tangganya. Keputusan menerapkan desentralisasi fiskal menuntut adanya peningkatan ekonomi di daerah karena prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah *money follows functions*, yaitu fungsi pokok pelayanan publik di daerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah (Siagian, 2010). Salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu, sumber penerimaan suatu daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Hasil Penelitian menemukan bahwa variabel PAD, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan DAU berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Riau karena besarnya PAD yang didapat telah mampu mencukupi belanja daerah tanpa harus bergantung dari DAU. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode penelitian yang lebih panjang dengan memperoleh hasil yang lebih baik. Dan penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain selain dari variabel yang ada dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil.

**ANALYSIS OF THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME,
GENERAL ALLOCATION FUNDS, SPECIFIC ALLOCATION FUNDS
AND FUNDS FOR THE RESULTS ON REGIONAL EXPENDITURE IN
RIAU PROVINCE**

Aulia Putri Cornella¹⁾, Erni Febrina Harahap²⁾, Kasman Karimi³⁾

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, dan Bisnis
Universitas Bung Hatta

Email : auliaputricornella@gmail.com, erni_fh@yahoo.com,
kasmankarimi1967@gmail.com

ABSTRACT

Fiscal decentralization is the delegation of authority to the regions in their own financial sources, so that regions have more opportunities for household assistance. The decision to implement fiscal decentralization demands an increase in the economy in the regions because the principle of implementing fiscal decentralization in Indonesia is that money follows a function, namely the main function of the deployed public services, with central financing support through the delivery of regional revenue sources (Siagian, 2010). One of the sources of revenue originating from the regions to finance regional government administration is Regional Original Income (PAD). In addition, regional revenue from the regional revenue and expenditure budget (APBD) is the Special Allocation Fund (DAK), the General Allocation Fund (DAU) and the Revenue Sharing Fund (DBH).

The results of the study found that the PAD, DAK, and DBH variables had a significant effect on regional spending, while the DAU had no significant effect on regional spending in Riau Province because much of the PAD obtained was able to meet regional spending without having to pay from DAU. Future studies are expected to use a longer study period with better results. And further research added other variables apart from the variables in this study.

Keywords: Local Own Income, General Allocation Fund, Profit Sharing Fund.